



PT Adindo Foresta Indonesia Tbk



Laporan Tahunan 2019



Daftar Isi

1. Visi dan Misi Perseroan
2. Laporan Dewan Komisaris
3. Laporan Direksi
4. Profil Perusahaan.
8. Kronologi Persitiwa Penting
9. Analisa dan Pembahasan Manajemen
10. Ikhtisar Data Keuangan Penting
11. Tinjauan Keuangan
17. Modal dan Kepemilikan Saham
18. Tata Kelola Perusahaan



VISI MISI PERSEROAN

VISI PERSEROAN

Mengembangkan nilai tambah bagi stakeholders Perseroan dengan motto “Apa yang kita kerjakan saat ini adalah untuk kebaikan pada saat-saat mendatang”

MISI PERSEROAN

Untuk mengaktualisasikan Perseroan menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2019 dengan agenda rapat adalah Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

RUPS Luar Biasa tersebut dipimpin oleh Bapak Ir. Yuli Aristianto, MM selaku Komisaris Utama.





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Bersama ini kami sampaikan laporan sehubungan dengan kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi PT Adindo Foresta Indonesia Tbk selama tahun 2019.

Dewan Komisaris memastikan bahwa kegiatan operasional Perseroan yang dilakukan Direksi mengacu kepada rencana bisnis yang telah diterapkan dan dikelola secara profesional sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara umum Dewan Komisaris menilai rencana kerja yang telah disusun Direksi cukup komprehensif dalam memberikan gambaran tentang prospek masa depan Perseroan serta kesinambungan kegiatan usaha. Rencana kerja usaha dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan kapasitas yang ada pada Perseroan.

Perubahan Dewan Komisaris

Pada tahun 2019 ini terjadi perubahan pada jajaran Dewan Komisaris, Ibu Cenny Liong masuk menggantikan Bapak Haryanto Wisastra sebagai Komisaris Utama, dan Bapak Ir. Yuli Aristianto, MM masuk menggantikan Bapak DR. Albert Widjaja sebagai Komisaris Independen.

Ucapan Terimakasih

Dewan Komisaris mengharapkan dukungan tiada henti dari para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana juga dukungan yang kami kepada jajaran Direksi, untuk mewujudkan Perseroan yang bertumbuh kembang termasuk langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan pada periode-periode mendatang.

Atas dukungan yang tiada henti dari Pemegang Saham, atas nama Direksi dan Karyawan, kami menghaturkan terima kasih.

Terima kasih.

Dewan Komisaris



LAPORAN DIREKSI

Pendapatan Perseroan pada tahun 2019 ini, turun jika dibandingkan dengan pendapatan tahun lalu. Hal ini disebabkan ada beberapa alat berat yang telah kami jual, sehingga produktivitas usaha menurun..

Penjualan beberapa alat berat kami lakukan, disebabkan alat-alat berat tersebut sudah tidak produktif dan apabila alat tersebut diperbaiki akan memakan biaya yang cukup besar, penjualan beberapa alat berat ini juga guna kelangsungan hidup Perseroan.

Perubahan Direksi

Tahun ini seperti juga halnya Dewan Komisaris, terjadi perubahan susunan Direksi. Bapak Darwin masuk menggantikan Bapak I Gde Parta Wirawan sebagai Direktur Utama, dan Ibu Ing ing masuk menggantikan Bapak Ranold Ramoko sebagai Direkur.

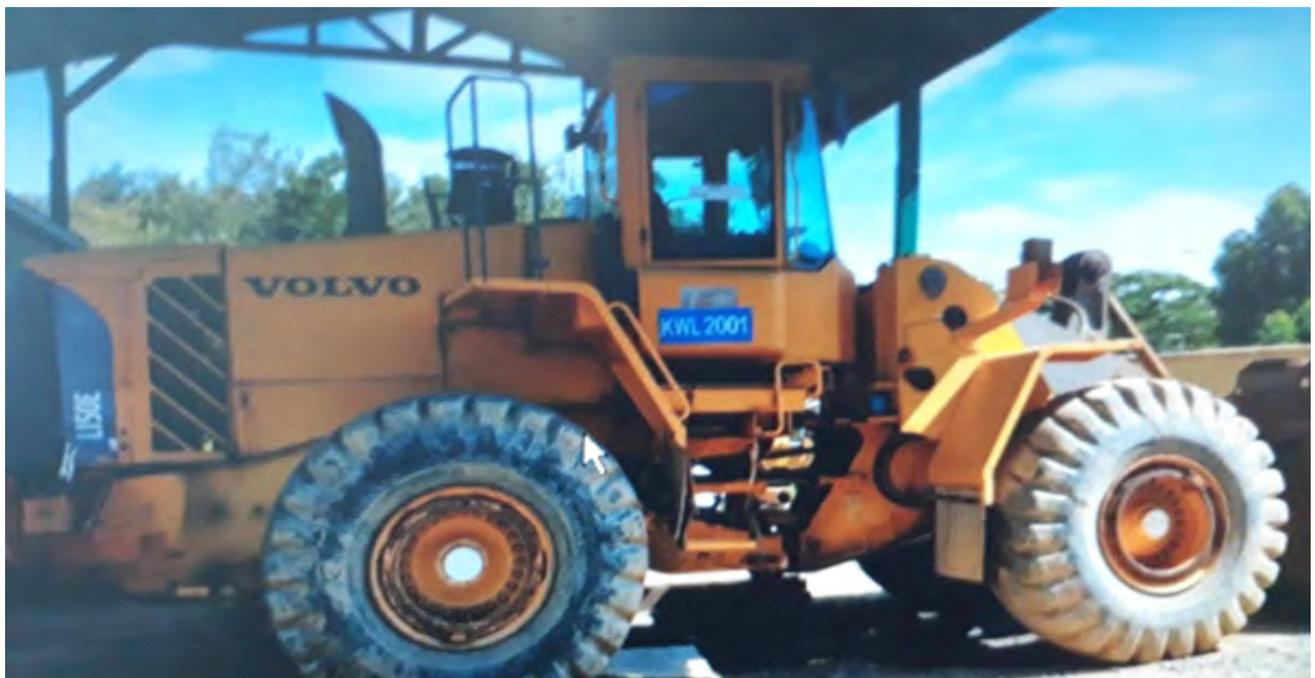
Ucapan Terimakasih

Direksi menghaturkan terimakasih atas dukungan tiada henti dari Dewan Komisaris agar dapat melaksanakan kegiatan operasional seoptimal mungkin, serta Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya, atas kepercayaan yang diberikan kepada kami selaku Direksi untuk menjalankan roda Perseroan.

Untuk kedepannya, kami tetap berkomitmen menjalankan kegiatan penyewaan alat-alat berat dengan terus menjaga kehandalan alat-alat berat yang kami miliki saat ini dan tetap berusaha mencari peluang untuk menambah investasi dengan mempertimbangkan juga kondisi Perseroan.

Terima kasih.

Direksi





PROFIL PERUSAHAAN

PT Adindo Foresta Indonesia Tbk ("Perseroan") didirikan pada tanggal 17 Maret 1990 berdasarkan Akta nomor 19 yang dibuat dihadapan Notaris DR Haji Erwal Gwang, S.H dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-3956.HT.01.01.Th90 tanggal 7 Juli 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia N0.75 Tambahan N0.3415, tanggal 18 September 1990.

Pada tanggal 6 Januari 2000, Perseroan memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Emisi Saham No.S.22/PM/2000 dari Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat sejumlah 56.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 setiap sahamnya. Perseroan telah mencatat seluruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 2 Februari 2000.

Untuk mengadministrasikan saham, Perseroan bekerjasama dengan PT Sirca Datapro Perdana, suatu perusahaan yang bergerak di bidang administrasi efek yang beralamat di Wisma Sirca Jl. Johar Baru No.18 Menteng, Jakarta Pusat.

Pada tanggal 3 Februari 2002, Bursa Efek Jakarta melakukan penghentian sementara (*suspend*) atas perdagangan saham Perseroan.

Pada tanggal 3 Februari 2004, berdasarkan surat No.S-001/BEJ-PSR/02-2004 Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) memutuskan untuk menghapus pencatatan saham (*delisting*) Perseroan yang berlaku efektif mulai tanggal 11 Maret 2004.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Perubahan Pengurus melalui Akta No. 01 tanggal 03 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, SH notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.0-0335484, tanggal 23 September 2019.

Sesuai pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang jasa penunjang kehutanan lainnya.

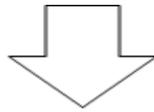
Perseroan berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Batavia lantai 11, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat.



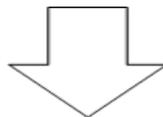


STRUKTUR ORGANISASI

**Rapat Umum
Pemegang Saham**



**Dewan
Komisaris**



Direksi



PROFIL DEWAN KOMISARIS



Cenny Liong

Warga Negara Indonesia, lahir di Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada tanggal 12 Maret 1966. Alumnus STMIK Bina Nusantara, Mengawali karir di Unibank dengan jabatan terakhir Kepala Biro IT.

Diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2019.



Ir. Yuli Aristianto, MM

Warga Negara Indonesia, lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 25 Juli 1960. Alumnus Universitas Gajah Mada. Mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Kehutanan (Eselon IV) sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994. Sebagai Division Head di PT Inhutani (Persero) sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2010.

Diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2019.



PROFIL DIREKSI



Darwin

Warga Negara Indonesia, lahir di Lubuklinggau Sumatera Selatan pada tanggal 26 Juli 1984. Alumnus Universitas Bina Nusantara, Mengawali karir di Citibank sebagai Bussines Development Associate, pernah bekerja di BCA, Bank Mandiri, Bank of China, dan di Bank CTBC Indonesia.

Diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2019.



Ing ing

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 29 Januari 1981. Alumnus Erasmus University Netherland. Mengawali karir di Indover Bank sebagai Trainee Credit Analyst dan Optier B.V sebagai Risk Manager.

Diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2019.



KRONOLOGI PERISTIWA PENTING

14 Juni 2019

Perseroan menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku 2018, dengan agenda rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penggunaan Laba Perseroan;
3. Penunjukkan Akuntan Publik;
4. Penetapan besarnya renumerasi dan tunjangan lain bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

RUPS Tahunan tersebut dipimpin oleh Bapak I Gde Parta Wirawan selaku Direktur Utama Perseroan.

03 September 2019

Perseroan menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2019 dengan agenda rapat adalah Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

RUPS Luar Biasa tersebut dipimpin oleh Bapak Ir. Yuli Aristianto, MM selaku Komisaris Utama.





ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Perseroan usaha yang diperoleh Perseroan pada tahun 2019 ini turun jika dibandingkan tahun lalu. Hal ini tidak terlepas dari strategi Perseroan yaitu melakukan penjualan beberapa alat berat, dan mempertahankan beberapa alat berat lainnya.

Strategi dengan melakukan penjualan beberapa alat ini erseroan menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2019 dengan agenda rapat adalah Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

Untuk kedepannya , Perseroan tetap berkomitmen menjalankan kegiatan penyewaan alat berat dengan terus menjaga kehandalan alat berat yang Perseroan miliki saat ini dan berusaha mencari peluang untuk menambah investasi dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan.





IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk lima tahun, yang berakhir untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2015 - 2019 yang dikutip dari laporan konsolidasian Perseroan yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk tahun 2019, 2018, dan 2017, Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan untuk tahun 2016 dan 2015.

Uraian (dalam jutaan Rupiah kecuali jumlah saham yang beredar)	2019	2018	2017	2016	2015
Aset lancar	6.749	6.120	5.454	5.589	3.979
Aset tidak lancar	501	736	1.003	1.297	1.500
Jumlah Aset	7.250	6.856	6.457	6.886	5.479
Liabilitas jangka pendek	53	56	49	1.382	45
Liabilitas jangka panjang	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas	53	56	49	1.382	45
Ekuitas	7.197	6.800	6.408	5.504	5.434
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	7.250	6.856	6.457	6.886	5.479
Modal kerja bersih	6.696	6.064	5.405	4.207	3.934
Pendapatan	453	948	646	960	2.280
Laba (rugi) kotor	210	682	354	(468)	(574)
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	399	399	911	80	(992)
Laba (rugi) tahun berjalan	397	392	904	70	(1.015)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain tahun berjalan	397	392	904	70	(1.015)
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada :					
Pemilik entitas induk	397	392	904	70	(1.015)
Kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-
Penghasilan (kerugian) komprehensif yang diatribusikan kepada :					
Pemilik entitas induk	397	392	904	70	(1.015)
Kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-
Jumlah saham yang beredar (dalam jutaan lembar saham)	746	746	746	746	746
Laba (rugi) per saham dasar (dalam rupiah)	0,53	0,53	1,21	0,09	(1,36)
Rasio Usaha					
Laba (rugi) kotor terhadap pendapatan	46%	72%	55%	-49%	-25%
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan terhadap ekuitas	6%	6%	14%	1%	-18%
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan terhadap jumlah aset	6%	6%	14%	1%	-18%
Laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan	88%	41%	140%	7%	-45%
Laba (rugi) tahun berjalan terhadap ekuitas	6%	6%	14%	1%	-19%
Laba (rugi) tahun berjalan terhadap jumlah aset	5%	6%	14%	1%	-19%
Rasio Keuangan					
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	12734%	10911%	11054%	404%	8842%
Jumlah liabilitas terhadap ekuitas	1%	1%	1%	25%	1%
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	1%	1%	1%	20%	1%



TINJAUAN KEUANGAN

Pembahasan dan analisa berikut mengacu pada Laporan Keuangan PT Adindo Foresta Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan keuangan tersebut telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

LAPORAN LABA (RUGI) KONSOLIDASIAN (dalam Rupiah)	2019	2018	Peningkatan/ (penurunan)
Pendapatan	453.000.000	948.000.000	-52%
Beban pokok pendapatan	(242.833.333)	(265.513.478)	-9%
Laba (rugi) kotor	210.166.667	682.486.522	-69%
Beban umum dan administrasi	(240.354.506)	(415.369.806)	-42%
Pendapatan lain-lain	430.210.098	133.428.337	222%
Beban lain-lain	(633.500)	(1.561.999)	-59%
Laba (rugi) usaha	399.388.759	398.983.054	0%
Beban keuangan	-	-	0%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	399.388.759	398.983.054	0%
Beban pajak penghasilan			
- Pajak final	(2.265.000)	(7.110.000)	-68%
Beban pajak penghasilan bersih	(2.265.000)	(7.110.000)	-68%
Laba (rugi) tahun berjalan	397.123.759	391.873.054	1%
Penghasilan komprehensif lain	-	-	0%
Jumlah penghasilan komprehensif lain	-	-	0%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	397.123.759	391.873.054	1%
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada:			
- Pemilik entitas induk	397.123.759	391.873.054	1%
- Kepentingan non pengendali	-	-	0%
Laba (rugi) per saham dasar	0,53	0,53	1%

PENDAPATAN

Selama tahun 2019 Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp453.000.000 mengalami penurunan 52% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan pendapatan disebabkan berkurangnya alat-alat berat yang dapat disewakan kepada pelanggan (semula 6 unit menjadi 3 unit alat berat).

Pendapatan Perseroan ini berasal dari usaha jasa penyewaan alat-alat berat.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban pokok pendapatan turun 9% dari sebesar Rp265.513.478 pada tahun 2018, menjadi sebesar Rp242.833.333 pada tahun 2019. Beban pokok pendapatan merupakan beban penyusutan alat-alat berat yang disewakan kepada pihak ketiga.

Penurunan beban pokok pendapatan, disebabkan turunnya beban penyusutan aset tetap.



LABA (RUGI) KOTOR

Menurunnya pendapatan, berdampak langsung turunnya laba kotor Perseroan. Laba (rugi) kotor Perseroan turun 69%, dari semula sebesar Rp682.486.522.000 pada tahun 2018, menjadi sebesar Rp210.166.667 pada tahun 2019.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi di tahun 2019 turun 42% dibandingkan dengan tahun 2018. Dari semula sebesar Rp415.369.806 di tahun 2018, menjadi sebesar Rp240.354.506 pada tahun 2019. Penurunan terutama disebabkan tidak adanya biaya jasa manajemen dari sebesar Rp180.000.000 pada tahun 2018, menjadi nil pada tahun 2019. Gaji dan tunjangan pegawai juga turun dari sebesar Rp61.800.000 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp30.900.000 pada tahun 2019. Beban sekertaris perusahaan, jasa profesional, pemasaran, perijinan, jasa manajemen, dan lain-lain mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu.

PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain pada naik 222% dari sebesar Rp133.429.337 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp430.210.098 di tahun 2019. Kenaikan terutama disebabkan adanya laba penjualan aset tetap sebesar Rp281.818.181. Pendapatan jasa giro mengalami kenaikan dari sebesar Rp111.724.573 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp148.391.917 pada tahun 2019.

BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain berupa beban administrasi bank, turun 59% dari sebesar Rp1.561.000 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp633.500 pada tahun 2019.

BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH

Pendapatan Perseroan sepanjang tahun 2019 adalah sebesar Rp453.000.000, dikenakan pajak final 0,5% yaitu sebesar Rp633.500.

Pajak final 0,5% ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang pajak final dengan tarif 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau Perseroan Terbatas yang memperoleh penghasilan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000. Peraturan ini berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2018.

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

Pada tahun 2019, Perseroan memperoleh laba tahun berjalan sebesar Rp397.123.759, naik 1% jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp391.874.053. Kenaikan laba tahun berjalan terutama disebabkan turunnya beban pajak penghasilan.



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam Rupiah)	2019	2018	Peningkatan/ (penurunan)
Aset lancar	6.748.155.440	6.120.483.944	10%
Aset tidak lancar	501.388.193	735.511.804	-32%
Jumlah Aset	7.249.543.633	6.855.995.748	6%
Liabilitas jangka pendek	50.000.000	49.000.000	2%
Liabilitas jangka panjang	2.520.000	7.095.874	0%
Jumlah Liabilitas	52.520.000	56.095.874	-6%
Ekuitas	7.197.023.633	6.799.899.874	6%
Total Liabilitas dan Ekuitas	7.249.543.633	6.855.995.748	6%

ASET

Pada tahun 2019, total aset Perseroan mengalami peningkatan 6% jika dibandingkan dengan tahun lalu, dari sebesar Rp6.855.995.748 di tahun 2018 menjadi sebesar Rp7.249.543.633 pada tahun 2019.

ASET LANCAR

Aset lancar Perseroan naik sebanyak 10% dari sebesar Rp6.120.483.944 di tahun 2018 menjadi sebesar Rp6.748.155.440 pada tahun 2019.

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas sebesar Rp4.979.657.412 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp4.328.835.916, terdiri dari kas di bank sebesar Rp979.657.412 dan deposito berjangka sebesar Rp4.000.000.000.

b. Piutang usaha

Pada tahun 2019 terdapat penurunan piutang usaha walaupun tidak signifikan, dari sebesar Rp1.791.498.028 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.768.398.028 pada tahun 2019. Piutang usaha merupakan piutang atas jasa sewa peralatan berat dalam bidang kehutanan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap akun piutang pelanggan pada akhir tahun, manajemen Perseroan berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut, karena manajemen berkeyakinan bahwa piutang dapat ditagih di tahun 2020.

ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar Perseroan turun 32% jika dibandingkan dengan tahun lalu, pada tahun 2018 aset tidak lancar Perseroan sebesar Rp735.511.804 menjadi sebesar Rp501.388.193 pada tahun 2019.

Aset tidak lancar terdiri dari aset tetap (berupa peralatan berat yang disewakan kepada perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan).



LIABILITAS DAN EKUITAS

Perseroan membukukan liabilitas dan ekuitas sebesar Rp7.249.543.633 pada tahun 2019 naik 6% jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp6.855.995.748.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada akhir tahun 2019, liabilitas jangka pendek Perseroan turun 6% dari sebesar Rp56.095.874 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp52.520.000 pada tahun 2019.

EKUITAS

Ekuitas Perseroan pada akhir tahun 2019 meningkat 6% dari sebesar Rp6.799.899.874 di tahun 2018 menjadi sebesar Rp7.197.023.633 pada tahun 2019.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (dalam Rupiah)	2019	2018	Peningkatan/ (Penurunan)
Arus kas dari aktivitas operasi			
Penerimaan dari pelanggan	476.000.000	1.303.820.000	-63%
Pembayaran kas kepada pemasok	(227.934.228)	(231.633.520)	-2%
Penerimaan lain-lain	148.391.917	133.428.337	11%
Penerimaan pajak	(16.320.874)	78.086	-21001%
Pembayaran lain-lain	(633.500)	(1.561.000)	-59%
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	379.503.315	1.204.131.903	-68%
Arus kas dari aktivitas operasi			
Penambahan aset tetap	(10.500.000)	-	0%
Hasil penjualan aset tetap	281.818.181	-	0%
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	271.318.181	-	0%
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	650.821.496	1.204.131.903	-46%
Kas dan setara kas pada awal tahun	4.328.835.916	3.124.704.013	39%
Kas dan setara kas pada awal tahun	4.979.657.412	4.328.835.916	15%

ARUS KAS

Posisi kas dan setara kas Perseroan pada akhir tahun 2019 jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu, mengalami kenaikan 15%, dari sebesar Rp4.328.835.916 di tahun 2018 menjadi sebesar Rp4.979.657.412 pada tahun 2019.



KELANJUTAN USAHA DAN RENCANA MANAJEMEN

Pada tahun 2019, Perseroan mengalami laba per saham dasar sebesar Rp0,53 lebih rendah jika dibandingkan dengan laba per saham dasar tahun 2017 sebesar Rp1,21. Hal ini terjadi disebabkan adanya penurunan laba tahun berjalan.

Untuk kedepannya, Perseroan tetap berkomitmen menjalankan kegiatan penyewaan alat berat dengan terus menjaga kehandalan alat berat yang kami miliki saat ini dan mencari peluang untuk menambah investasi dengan mempertimbangkan juga kondisi Perseroan.

MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari aset dan liabilitas keuangan Perseroan adalah risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risiko kredit

Risiko kredit Perseroan terutama dari simpanan di bank dan risiko kerugian yang muncul apabila pelanggan gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Perseroan meminimalisasi risiko kredit dari simpanan bank dengan menyimpan dana hanya pada bank yang memiliki reputasi baik.

Perseroan meminimalisasi risiko kredit dari piutang dengan menetapkan batasan jumlah yang dapat diberikan dan jatuh tempo umur piutang. Risiko ini juga dikelola dengan pengawasan berkesinambungan atas jumlah dan status ketertagihan piutang tersebut.

Berdasarkan pengalaman, tidak terdapat risiko kredit yang secara signifikan dimana ada tagihan piutang yang tidak tertagih.

Eksposur maksimum Perseroan atas risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat bersih tiap aset keuangan di laporan posisi keuangan.

Risiko likuiditas

Perseroan dapat terekspose terhadap risiko likuiditas apabila ada perbedaan waktu signifikan antara penerimaan piutang dengan penyelesaian utang dan pinjaman.

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi arus kas dan fasilitas pinjaman yang tersedia. Risiko ini diminimalisir dengan mengelola berbagai sumber pembiayaan dari para pemberi pinjaman yang dapat diandalkan



Manajemen Pengelolaan Modal

Tujuan Perseroan saat mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Perseroan dalam kelanjutan usahanya dan menjaga struktur modal yang optimal untuk meminimalkan biaya modal. Untuk menjaga struktur modal, Perseroan akan selalu memantau tingkat pinjaman dari waktu ke waktu.

Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis, dan faktor, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Aset tetap

Perseroan menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan aset tetap milik Perseroan, Perseroan akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau Perseroan akan menghapusbukukan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

Laba (rugi) per saham

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	397.123.759	391.873.054
Jumlah saham beredar (rata-rata tertimbang)	745.543.638	745.543.638
Laba bersih per saham	0,53	0,53



MODAL DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Pemegang Saham	Lembar Saham (Lembar)	Jumlah Kepemilikan Rp	Persentase Kepemilikan
Saham seri A, nilai nominal Rp500 per lembar saham			
PT Ari Perdanagung	34.000.000	17.000.000.000	4,56%
Creston Atlantic Ltd	13.750.000	6.875.000.000	1,84%
Optima Pacific Ltd	5.034.000	2.517.000.000	0,68%
Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%)	62.216.000	31.108.000.000	8,35%
Jumlah saham Seri A	115.000.000	57.500.000.000	15,42%
Saham seri B, nilai nominal Rp60 per lembar saham per saham			
PT Ari Perdanaagung	114.959.620	6.897.577.200	15,42%
Creston Atlantic Ltd	133.569.420	8.014.165.200	17,92%
Optima Pacific Ltd	139.005.070	8.340.304.200	18,64%
Bezehill International Ltd	243.009.528	14.580.571.680	32,59%
Jumlah saham Seri B	630.543.638	37.832.618.280	84,58%
Jumlah	745.543.638	95.332.618.280	100,00%





TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan mempunyai kerangka tata kelola perusahaan yang meliputi hubungan antara tiga badan pengambilan keputusan tertinggi, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

PT Adindo Foresta Indonesia Tbk (Perseroan) sebagai perusahaan publik, berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan publik yang bertanggung jawab, serta dilakukan untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Pada tahun 2019, Perseroan tetap memenuhi penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka sesuai Peraturan OJK No.021/POJK.04/2015, sebagaimana terperinci di bawah ini:

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Implementasi
Hubungan Perseroan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak Pemegang Saham	1. Meningkatkan nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1. Perusahaan terbuka merencanakan cara atau prosedur teknis pengumpulan (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.	2. Terpenuhi Perseroan telah memenuhi aturan terkait penyelenggaraan RUPS dimana voting dilakukan secara terbuka, mengangkat tangan sesuai dengan aturan yang telah disampaikan oleh pemimpin rapat. Sedangkan voting tertutup dilakukan melalui kartu yang dibagikan kepada setiap peserta rapat sesuai kebutuhan, kedepannya dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dalam tata kelola RUPS.
		2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	2. Terpenuhi Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan Perseroan (terdapat dalam ringkasan risalah RUPS) Berita Acara RUPS Tahunan.
		3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perseroan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	3. Terpenuhi Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perseroan (www.adindoforesta.com)
	2. Perseroan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	1. Perseroan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	1. Terpenuhi Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham yang tersedia di situs web Perseroan (www.adindoforesta.com)
		2. Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perseroan terbuka dengan pemegang saham atau investor.	2. Terpenuhi Materi dan informasi yang dimiliki oleh Perseroan selalu disampaikan dalam web Perseroan (www.adindoforesta.com) untuk menjamin kesetaraan penyampaian informasi kepada pemegang saham/investor.



Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris.	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	1. Terpenuhi Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Perseroan memiliki dua orang Komisaris, dan satu diantaranya adalah Komisaris Independen.
		2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	2. Terpenuhi Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi berbagai keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan oleh Perseroan.
	2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (selfassessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	1. Terpenuhi Perseroan telah memiliki kebijakan umum terkait dengan penilaian kinerja Dewan Komisaris yang tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris.
		2. Kebijakan penilaian sendiri (selfassessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan Terbuka.	2. Terpenuhi Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) telah diimplementasikan Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi Nominasi dan Renumerasi dalam melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Dewan Komisaris.
		3. Dewan Komisaris memiliki kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam tindak kejahatan keuangan.	3. Terpenuhi Perseroan memiliki kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris.
		4. Dewan Komisaris atau komisi yang menjalankan fungsi nominasi anggota Direksi.	4. Terpenuhi Perseroan melalui Komite Nominasi dan Renumerasi telah memiliki kebijakan dan program sukses dalam proses nominasi anggota Direksi.
Fungsi dan Peran Direksi	1. Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi	1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	1. Terpenuhi Penentuan jumlah anggota Direksi telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan memiliki dua anggota Direksi.
		2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	2. Terpenuhi Komposisi anggota Direksi telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan oleh Perseroan.
		3. Direksi membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	3. Terpenuhi Direktur Perseroan telah memiliki latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Akuntansi dari Erasmus University, Netherland dan memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan di beberapa perusahaan.



Keterbukaan informasi	1. Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi	1. Perseroan terbuka memanfaatkan pengguna teknologi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi	1. Terpenuhi Perseroan telah secara rutin menyampaikan informasi tidak hanya terbatas pada keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku namun juga informasi lain terkait Perseroan melalui situs web.
		2. Laporan Tahunan Perseroan mengungkapkan kepemilikan saham perseroan terbuka sedikit 5%, selanjutnya pengungkapan kepemilikan saham Perseroan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	2. Terpenuhi Perseroan telah mengungkapkan kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% juga mengungkapkan kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali dalam Laporan Tahunan Perseroan setiap tahun terakhir.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pengelola Perseroan tertinggi. RUPS memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan para komisaris dan direksi, menetapkan masalah-masalah penting lainnya yang berkenaan dengan bisnis dan operasi Perseroan, termasuk jumlah renumerasi bagi para anggota direksi dan komisaris, pembayaran deviden dan pembagian keuntungan, persetujuan tentang laporan tahunan, penunjukan auditor independen, perubahan Anggaran Dasar, dan pendelegasian kepada direksi untuk menindaklanjuti pokok-pokok permasalahan yang disetujui dan dibahas dan disetujui dalam RUPS.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, RUPS diselenggarakan dalam jangka waktu enam bulan sejak berakhirnya tahun buku. Pemberitahuan RUPS harus diumumkan di surat-surat kabar terkemuka dan diumumkan di situs web Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum tanggal pemanggilan. Pemberitahuan tersebut harus mencantumkan informasi siapa yang berhak hadir dan ketentuan tentang prosedur voting melalui surat kuasa. Auditor independen Perseroan dan penasihat hukum juga berhak menghadiri RUPS.

RUPS Perseroan terakhir kali diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2019 untuk menyetujui Laporan Tahunan 2018, serta menerima laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, menyetujui untuk tidak melakukan pembagian laba, menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan renumerasi kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan terakhir kali diselenggarakan pada tanggal 03 September 2019 untuk menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.



DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris terdiri dari satu orang Komisaris Utama dan satu orang Komisaris Independen. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS terhitung sejak RUPS mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah diangkatnya Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan, dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya tersebut.

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Tugas Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris:

1. Mengawasi kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas.
3. Pada setiap akhir tahun buku, melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut.
4. Dalam kondisi tertentu wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Dalam hal Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib untuk sementara mengurus Perseroan.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada Point 2 jika dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan.
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.



4. Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan melaporkan kepada Perseroan adanya kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi untuk selanjutnya dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dan BEI. Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. jumlah saham yang dibeli.
 - b. harga pembelian dan penjualan per saham.
 - c. tanggal transaksi.
 - d. tujuan dan transaksi.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi Komisaris Independen yang memang tidak diperkenankan untuk memiliki saham Perseroan sebagaimana persyaratan keanggotaan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris:

Penilaian kinerja Dewan Komisaris telah diatur dalam piagam Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Prosedur penilaian (assessment) atas kinerja Dewan Komisaris.
 - a. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (self assesment) atas kinerjanya, yang kemudian dievaluasi Pemegang Saham dalam RUPS. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham.
 - b. Kinerja evaluasi kerja Dewan Komisaris diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan fungsi Komite Nominasi dan Renumerasi Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS.
2. Prosedur pelaksanaan penilaian (assessment) atas kinerja Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - a. Hasil self-assesment Dewan Komisaris.
 - b. Evaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
3. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assesment atas Kinerja Dewan Komisaris sekurang-kurangnya atas sebagai berikut:
 - a. Kontribusi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas pengurusan Perseroan.
 - b. Pencapaian program kerja komite-komite Dewan Komisaris.
 - c. Pengetahuan bisnis dan identifikasi resiko bisnis.
 - d. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.
 - e. Penerapan Good Corporate Governance (GCC).
 - f. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, ketentuan RUPS, serta kebijakan Perseroan.
4. Pihak yang melakukan Assesment:
 - a. Pihak yang melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS, dimana pertimbangan-pertimbangan penilaian tersebut diambil berdasarkan laporan hasil penilaian sendiri (self-assesment) yang dilakukan Dewan Komisaris melalui Rapat-rapat Dewan Komisaris.
 - b. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.



Prosedur Penetapan Renumerasi Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris sesuai fungsi renumerasinya merekomendasi usulan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris kepada Komisaris Utama Perseroan.
2. Direksi mengusulkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan untuk memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan.
3. RUPS Tahunan memberikan kewenangan bagi Komisaris Utama atas Rekomendasi Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi renumerasinya untuk menetapkan renumerasi.
4. Komisaris Utama melakukan kajian atas rekomendasi Dewan Komisaris dan selanjutnya menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan renumerasi yang diberikan pada tahun lalu, kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan yang berlaku di dalam Perseroan.

Dasar Penetapan Renumerasi Untuk Setiap Anggota Dewan Komisaris:

Kewenangan Komisaris Utama untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

DIREKSI

Tugas Direksi sesuai dengan Piagam Direksi:

1. Direktur Utama mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan seluruh departemen-departemen dan operasional Perseroan, yang dalam pelaksanaannya dibantu dan bekerjasama dengan Direksi lainnya.
2. Direksi dengan iktikad baik dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Tanggung jawab Direksi sesuai dengan Piagam Direksi:

1. Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
2. Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta mengevaluasi pencapaiannya.
3. Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan.
4. Merencanakan, mengelolakan, dan mengendalikan kebijakan bidang komunikasi Perseroan, hubungan kelembagaan, dan hubungan investor.



5. Mengendalikan kegiatan pengembangan teknologi, enjiniring, pembangunan, dan teknologi informasi.
6. Mengendalikan kegiatan operasi, pemasaran, penjualan, serta keselamatan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan.
7. Mengendalikan kegiatan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, keuangan Perseroan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan.
8. Mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, layanan umum dan pengamanan Perseroan, kelogisitikan, organisasi dan proses bisnis serta manajemen aset.
9. Mengendalikan perencanaan strategis pengembangan bisnis, transformasi bisnis, dan manajemen resiko.
10. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada point di atas jika dapat dibuktikan:
 - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut:
 - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Penilaian Kinerja Direksi:

Penilaian kinerja anggota Direksi telah diatur dalam Piagam Direksi sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan penilaian (assessment) atas kinerja Direksi:
 - a. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi melakukan penilaian sendiri (self-assessment) atas kinerjanya berdasarkan pencapaian tugas manajemen.
 - b. Sistem penilaian kinerja bagi Direksi disusun oleh Direksi dan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, yang dalam hal ini dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk kemudian dievaluasi oleh pemegang saham dalam RUPS. Sistem dimaksud akan terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan organisasi.
2. Prosedur pelaksanaan penilaian (assessment) atas kinerja Direksi sebagai berikut:
 - a. Hasil Self-Assessment Direksi.
 - b. Evaluasi oleh Dewan Komisaris.
3. Kriteria penilaian kinerja Direksi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Pencapaian program kerja Direksi dan Komite-komite Direksi.
 - b. Pengetahuan bisnis dan identifikasi risiko bisnis.
 - c. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.
 - d. Penerapan Good Corporate Governance (GCG).
 - e. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, ketentuan RUPS, serta kebijakan Perseroan



4. Pihak yang Melakukan Penilaian:
 - a. Pihak yang melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Dewan Direksi adalah pemegang saham melalui mekanisme RUPS, dengan mempertimbangkan penilaian dan rekomendasi dari Dewan Komisaris berdasarkan laporan hasil penilaian sendiri yang dilakukan Direksi.
 - b. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Direksi. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan.

Prosedur Penetapan Remunerasi Untuk Direksi

1. Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi remunerasinya merekomendasi usulan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi kepada Komisaris Utama Perseroan.
2. Direksi mengusulkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan untuk memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan.
3. RUPS Tahunan memberikan kewenangan bagi Komisaris Utama atas rekomendasi Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi remunerasinya untuk menetapkan remunerasi.
4. Komisaris Utama melakukan kajian atas rekomendasi Dewan Komisaris dan selanjutnya menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dengan memperhatikan remunerasi yang diberikan tahun lalu, kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan yang berlaku di dalam Perseroan.

Dasar Penerapan Remunerasi Untuk Setiap Anggota Direksi

Kewenangan Komisaris Utama menetapkan gaji dan/ atau tunjangan kepada Direksi ditetapkan oleh RUPS Tahunan, memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan.

KOMITE AUDIT

Sampai saat ini Komite Audit belum terbentuk, hal ini disebabkan sejak tahun 2004 Perseroan telah di Delisting oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) (d/h Bursa Efek Jakarta), sehingga Perseroan tidak mengupdate peraturan-peraturan, baik peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pihak BEI.